



Dinamika Pariwisata dan Ritual di Pura Uluwatu Bali

Shafa Sabrina Imani¹, Cika Gracella Hermawan², Nur Ma'rifatul Amalia³, Wafa⁴,
Prisca Kiki Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

Email: shafasabrina@student.ub.ac.id

Article Info

Article history:

Received November 29, 2025

Revised December 08, 2025

Accepted December 17, 2025

Keywords:

Cultural Tourism, Uluwatu Temple, Sacredness, Cultural Commodification, Tri Hita Karana

ABSTRACT

This study examines the relationship between tourism activities and ritual practices at Pura Luhur Uluwatu, Bali, as a reflection of the interaction between modernization and efforts to maintain the spiritual values of the local community. Uluwatu Temple, which belongs to the Sad Kahyangan group, currently serves a dual role as a spiritual site and an international tourist destination. Using a qualitative approach through literature review, this study examines various secondary sources such as journals, books, and official documents to analyze the social and cultural impacts of tourism growth on the temple's sacredness. The findings indicate that the surge in tourism activities, particularly through Kecak Dance performances and economic activities around the temple, has driven a process of cultural commodification that can blur the boundaries between sacred areas and the ordinary world. Despite this, the local community continues to demonstrate cultural resilience by implementing the principles of Tri Hita Karana and a customary-based management system to maintain a balance between economic interests and spiritual values. This study emphasizes the importance of collaboration between the government, temple managers, and indigenous communities in realizing sustainable tourism management and respecting the sanctity of cultural spaces. These findings are expected to guide the development of a tourism model based on local wisdom, harmonizing economic, cultural, and spiritual aspects. Furthermore, this research also provides a theoretical contribution to understanding the relationship between commercialization and cultural preservation in sacred spaces. The findings can serve as a basis for further studies on the changing spiritual values of Balinese society amidst the globalization of tourism.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 29, 2025

Revised December 08, 2025

Accepted December 17, 2025

Keywords:

Pariwisata Budaya, Pura Uluwatu, Sakralitas, Komodifikasi Budaya, Tri Hita Karana

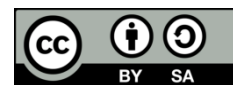
ABSTRACT

Penelitian ini membahas hubungan antara kegiatan pariwisata dan praktik ritual di Pura Luhur Uluwatu, Bali, sebagai gambaran dari interaksi antara modernisasi dan upaya mempertahankan nilai-nilai spiritual masyarakat setempat. Pura Uluwatu, yang termasuk dalam kelompok Sad Kahyangan, saat ini berperan ganda sebagai tempat spiritual serta tujuan wisata internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, penelitian ini meneliti berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi untuk menganalisis pengaruh sosial dan budaya dari pertumbuhan pariwisata terhadap kesakralan pura. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa lonjakan kegiatan wisata, khususnya melalui pertunjukan Tari Kecak dan aktivitas ekonomi di sekitar pura, telah mendorong proses komodifikasi budaya yang bisa mengaburkan perbatasan antara wilayah sakral dan dunia biasa. Meskipun begitu, masyarakat setempat tetap menunjukkan ketahanan budaya dengan



menerapkan prinsip Tri Hita Karana dan sistem pengelolaan berbasis adat untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pengelola pura, dan komunitas adat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan menghormati kesucian ruang budaya. Temuan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pengembangan model pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal dengan harmoni antara aspek ekonomi, budaya, dan spiritualitas. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memahami kaitan antara komersialisasi dan pelestarian budaya di ruang yang dianggap suci. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk studi lebih lanjut terkait perubahan nilai-nilai spiritual masyarakat Bali di tengah fenomena globalisasi pariwisata.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Shafa Sabrina Imanni

Universitas Brawijaya

Email: shafasabrina@student.ub.ac.id

PENDAHULUAN

Konteks Permasalahan dan Alasan Pemilihan Lokasi

Bali sejak lama dipandang sebagai pusat pariwisata budaya global, tetapi pertumbuhan industrinya tidak pernah bebas dari konsekuensi sosial. Pura Luhur Uluwatu menjadi contoh paling menonjol tentang bagaimana ruang sakral mengalami tekanan dari pembangunan pariwisata. Dalam dua dekade terakhir, situs yang sebelumnya berfungsi utama sebagai ruang ibadah dan pusat ritual kini juga beroperasi sebagai destinasi wisata internasional dengan atraksi pertunjukan seperti Tari Kecak, yang disesuaikan waktunya dengan ritme kunjungan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi yang lebih dalam daripada sekadar peningkatan aktivitas ekonomi. Transformasi ini berkaitan erat dengan proses komodifikasi budaya sebagaimana dijelaskan Cohen dan Greenwood, yaitu perubahan nilai simbolik dan spiritual menjadi nilai tukar yang dapat diwujudkan dalam bentuk tiket masuk, pertunjukan, dan pengalaman budaya yang diproduksi untuk pasar wisata. Di Uluwatu, ritual dan elemen budaya tertentu mengalami adaptasi agar sesuai dengan ekspektasi wisatawan, sehingga batas antara praktik sakral dan atraksi hiburan menjadi semakin kabur. Ketegangan muncul ketika masyarakat lokal berusaha mempertahankan makna spiritual di tengah kebutuhan ekonomi yang makin tergantung pada pariwisata.

Meski demikian, masyarakat Pecatu tidak bersikap pasif. Sebaliknya, mereka menegosiasikan perubahan tersebut melalui mekanisme kultural yang mencerminkan apa yang disebut Adger sebagai cultural resilience, yaitu kemampuan komunitas mempertahankan nilai inti sembari menyesuaikan diri terhadap tekanan eksternal. Penerapan prinsip Tri Hita Karana, pembatasan akses wisatawan ke area inti pura, serta pengaturan ruang profan dan sakral menunjukkan adanya upaya sadar untuk menjaga kesucian ruang ibadah. Namun upaya tersebut menghadapi persoalan tata kelola ketika kepentingan pengempon pura, desa adat, pemerintah



daerah, dan pelaku industri wisata tidak selalu sejalan. Di titik ini, konsep governance pariwisata relevan untuk menjelaskan bagaimana distribusi kewenangan, negosiasi kepentingan, dan pembagian manfaat memengaruhi arah pengelolaan kawasan suci. Dengan kata lain, masalah di Uluwatu bukan hanya soal meningkatnya wisatawan, tetapi juga bagaimana otoritas budaya dan spiritual dinegosiasikan dalam struktur pariwisata yang semakin kompleks.

Pemilihan Pura Luhur Uluwatu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada sifatnya yang unik sebagai ruang yang secara simultan merupakan pura aktif, arena pertunjukan budaya, dan pusat kegiatan ekonomi wisata. Keberadaan ritus keagamaan yang berjalan berdampingan dengan kegiatan komersial memberikan kesempatan analitis untuk melihat secara langsung bagaimana praktik sakral di rekontekstualisasi dalam ekonomi pasar. Perubahan sosial seperti alih profesi masyarakat lokal dari sektor tradisional ke industri wisata memperlihatkan bagaimana dinamika ekonomi dan spiritual saling memengaruhi. Kompleksitas ini menjadikan Uluwatu lokasi ideal untuk menelaah bagaimana nilai budaya dinegosiasikan, dipertahankan, atau disesuaikan dalam konteks pariwisata budaya yang berkembang pesat.

Kesenjangan Penelitian dan Urgensi Studi

Penelitian tentang pariwisata budaya di Bali telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dua studi yang paling relevan, yaitu Apsari (2023) dan Sudiarta (2020), menunjukkan bahwa masih terdapat celah penting yang belum terisi, khususnya terkait dinamika makna sakral dalam ruang wisata. Apsari menekankan bahwa komodifikasi budaya di Bali merupakan proses negosiasi sosial di mana masyarakat lokal tetap memiliki agensi dalam mengatur bentuk pertunjukan dan adaptasi budaya, tetapi penelitian ini tidak mendalami bagaimana makna sakral itu sendiri berubah dalam praktik keseharian masyarakat, terutama ketika ritual yang sebelumnya bersifat spiritual mulai dipentaskan sebagai konsumsi wisata. Sementara itu, Sudiarta menggambarkan ketegangan antara sakralitas dan komersialisasi di berbagai pura, namun analisisnya belum memetakan secara rinci bagaimana otoritas adat, pengempon pura, pemerintah daerah, dan pelaku wisata berinteraksi dalam menentukan batas ruang sakral dan ruang komersial, serta bagaimana negosiasi tersebut memengaruhi keberlanjutan nilai spiritual. Kedua penelitian tersebut belum menggabungkan analisis simbolik dan ekonomi dalam satu studi kasus yang terfokus, sehingga belum memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana makna sakral direkonstruksi, dipertahankan, atau bahkan dilemahkan di tengah tekanan industri wisata. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian di Pura Luhur Uluwatu menjadi penting, karena situs ini merupakan ruang yang sekaligus menjalankan fungsi ritual aktif dan fungsi komersial melalui pertunjukan wisata. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna memahami bagaimana masyarakat Pecatu mengelola batas sakral-profan, merespons komodifikasi budaya, dan menegosiasikan otoritas pengelolaan dengan berbagai aktor pariwisata. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris yang lebih kuat bagi perumusan tata kelola pariwisata budaya yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan spiritual dan legitimasi adat di kawasan suci.



KAJIAN LITERATUR

Teori dan Konsep yang Digunakan

Teori Komodifikasi Budaya

Konsep komodifikasi budaya merujuk pada proses ketika nilai-nilai simbolik, spiritual, atau sosial yang melekat dalam praktik budaya diubah menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan atau dikonsumsi secara komersial. Cohen (1988) menjelaskan bahwa komodifikasi terjadi ketika unsur budaya diproduksi ulang untuk memenuhi kebutuhan pasar wisata, sehingga fungsi aslinya mengalami transformasi. Greenwood (1989) menegaskan bahwa komodifikasi tidak hanya mengubah makna budaya, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara masyarakat lokal dan tradisi yang mereka miliki. Dalam konteks pariwisata budaya, komodifikasi sering tampak melalui pementasan ulang ritual, perubahan struktur ritual agar sesuai dengan waktu kunjungan wisatawan, serta pemanfaatan ruang sakral sebagai arena atraksi wisata. Transformasi nilai sakral menjadi nilai tukar menciptakan ambivalensi antara pelestarian dan eksploitasi budaya. Pitana (2019) mencatat bahwa di Bali, tekanan pariwisata telah memperluas praktik komodifikasi sehingga beberapa ritual yang awalnya bersifat privat kini dipertontonkan sebagai bagian dari paket wisata. Teori komodifikasi memberikan kerangka untuk menilai bagaimana nilai spiritual dan identitas budaya berhadapan dengan tuntutan ekonomi.

Teori Cultural Resilience

Teori cultural resilience menjelaskan bagaimana kelompok sosial mempertahankan nilai-nilai inti, kepercayaan, dan identitas budaya mereka sekaligus beradaptasi terhadap tekanan eksternal. Adger (2000) menyatakan bahwa resiliensi budaya bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi juga kemampuan komunitas untuk menegosiasikan perubahan tanpa kehilangan makna fundamental dalam sistem nilai mereka. Dalam konteks pariwisata, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat lokal mampu menjaga sakralitas ruang keagamaan, struktur adat, dan praktik ritual di tengah ekspansi industri pariwisata. Cultural resilience terlihat ketika masyarakat tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti seperti Tri Hita Karana, membatasi akses wisatawan ke area inti pura, menjaga aturan tata krama adat, dan memastikan bahwa pendapatan wisata digunakan untuk mendukung kegiatan ritual. Teori ini membantu memetakan dinamika adaptasi masyarakat lokal yang tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga mengatur batas agar nilai spiritual tetap terjaga.

Teori Governance Pariwisata

Governance pariwisata merujuk pada hubungan, koordinasi, dan mekanisme regulatif antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata, seperti pemerintah daerah, komunitas adat, pengelola situs budaya, dan pelaku industri wisata. Pendekatan ini melihat pengelolaan pariwisata bukan sebagai kebijakan linear, tetapi sebagai arena negosiasi kekuasaan dan kepentingan. Hall (2011) menjelaskan bahwa governance pariwisata berperan memperjelas distribusi kewenangan, perencanaan partisipatif, serta pembagian manfaat dan tanggung jawab dalam sektor pariwisata. Dalam kasus kawasan suci seperti Pura Uluwatu, governance mencakup pengaturan akses wisatawan, penentuan batas ruang profan dan sakral, pengelolaan ekonomi pariwisata, serta kolaborasi antara pengempon pura, desa adat, dan Dinas



Pariwisata. Brata (2020) menegaskan bahwa tata kelola berbasis budaya sangat diperlukan agar komunitas adat tidak menjadi objek dari sistem ekonomi wisata, melainkan aktor utama yang menjaga integritas budaya. Teori ini berguna untuk memahami bagaimana kebijakan, regulasi, dan koordinasi antar-aktor memengaruhi keseimbangan antara komersialisasi dan pelestarian budaya.

Sustainable Tourism Development

Teori sustainable tourism development menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dapat berlangsung tanpa merusak pondasi kehidupan masyarakat lokal. Butler (1999) menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu menjaga kualitas lingkungan, melindungi nilai budaya, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Dalam konteks Bali, pendekatan ini beririsan dengan konsep Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Sustainable tourism menekankan perlunya regulasi jumlah kunjungan, pengelolaan tata ruang, serta penegakan etika wisatawan dalam ruang sakral. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Pura Uluwatu dapat mempertahankan nilai sakralnya sambil tetap menjadi destinasi wisata unggulan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Apsari (2023) menunjukkan bahwa komodifikasi budaya di Bali tidak sekadar berupa perubahan tradisi menjadi tontonan wisata, tetapi melibatkan proses negosiasi sosial yang dilakukan masyarakat lokal untuk menyesuaikan praktik adat dengan kebutuhan pariwisata. Studi ini menegaskan bahwa komunitas tidak bertindak sebagai korban pasif dari pasar budaya, melainkan aktor yang secara sadar mengatur ulang bentuk pertunjukan, narasi budaya, dan struktur ruang demi menjaga keberlanjutan ekonomi sekaligus mempertahankan sebagian nilai sakral. Temuan Apsari penting karena memperlihatkan bahwa komodifikasi budaya tidak otomatis merusak makna budaya, tetapi bergantung pada bagaimana masyarakat memaknai, mengatur, dan mengelola perubahan tersebut. Konteks ini sangat dekat dengan situasi di Pura Luhur Uluwatu, di mana adaptasi budaya terjadi melalui pementasan Tari Kecak, pengaturan ruang sakral-profan, dan rekontekstualisasi praktik adat untuk konsumsi wisatawan.

Penelitian lain oleh Sudiarta (2020) mengkaji ketegangan antara sakralitas dan komersialisasi di sejumlah pura yang menjadi destinasi pariwisata utama di Bali. Ia menemukan bahwa pertumbuhan industri pariwisata mendorong pergeseran fungsi ruang dan ritual, dari praktik spiritual menjadi bagian dari lanskap ekonomi wisata. Namun studi ini juga menyoroti bahwa komunitas adat berupaya mempertahankan nilai sakral melalui regulasi lokal, pembatasan akses, hingga penguatan peran desa adat dalam pengelolaan situs suci. Relevansi penelitian ini dengan konteks Uluwatu sangat kuat, karena dinamika serupa muncul ketika ruang suci harus berbagi fungsi dengan kegiatan pertunjukan dan aktivitas komersial. Temuan Sudiarta membantu menjelaskan bagaimana konflik antara logika ekonomi dan nilai spiritual muncul serta bagaimana masyarakat lokal berusaha menjaga legitimasi dan otoritas adat dalam situasi tersebut.



Korelasi Penelitian Terdahulu dengan Topik

Penelitian mengenai pariwisata budaya di Bali telah mengidentifikasi pola komodifikasi, transformasi ruang sakral, dan berbagai bentuk adaptasi masyarakat lokal, tetapi kasus Pura Luhur Uluwatu menunjukkan kompleksitas yang lebih besar karena situs ini berfungsi ganda sebagai ruang ritual aktif dan sebagai destinasi wisata internasional dengan intensitas kunjungan yang tinggi. Kondisi ini menjadikan batas antara sakral dan profan bersifat cair serta terus dinegosiasikan oleh berbagai aktor. Celah tersebut belum sepenuhnya dipetakan dalam penelitian terdahulu, terutama ketika dinamika budaya, tata kelola lintas-aktor, dan keberlanjutan lingkungan saling bertemu di satu ruang suci.

Temuan Apsari (2023) mengenai komodifikasi budaya sebagai proses negosiasi sosial sangat relevan dengan konteks Uluwatu. Ia menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya mengikuti tekanan pasar wisata, tetapi juga secara aktif mengatur ulang pertunjukan budaya, narasi, dan struktur ruang untuk menjaga sebagian nilai sakral sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, Apsari belum membahas bagaimana proses negosiasi tersebut memengaruhi pengalaman spiritual masyarakat Pecatu dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mengisi kekosongan itu dengan menunjukkan bagaimana batas sakral profan direkonstruksi melalui aturan ruang, tata krama adat, dan pemilihan bagian ritual yang boleh dipertontonkan maupun yang tetap dijaga kerahasiaannya.

Sudiarta (2020) mengungkap ketegangan antara nilai sakral dan komersialisasi di pura-pura wisata, tetapi penelitiannya belum mengulas bagaimana hubungan antarlembaga pengempon pura, desa adat, pemerintah daerah, dan pelaku industri wisata membentuk arah pengelolaan ruang suci. Padahal, seperti terlihat di Uluwatu, relasi kekuasaan dan otoritas antar-aktor sangat menentukan bagaimana ruang suci ditata, diakses, dan dipertahankan dari tekanan pariwisata. Dengan memasukkan perspektif governance, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bagaimana koordinasi, negosiasi, dan tumpang tindih kewenangan berpengaruh langsung terhadap penentuan batas-batas ruang sakral, pola kunjungan wisatawan, hingga jenis aktivitas yang diperbolehkan dalam kawasan pura.

Studi Pujaastawa dan Sudana (2022) memperlihatkan bagaimana prinsip Tri Hita Karana dapat menjaga keseimbangan budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam destinasi wisata Bali. Namun penelitian tersebut belum menguji bagaimana prinsip tersebut diterapkan di lokasi dengan arus wisata massal seperti Uluwatu, yang menuntut regulasi lebih ketat terkait jumlah wisatawan, tata ruang, etika kunjungan, dan perlindungan ekologi tebing serta kawasan pesisir. Penelitian ini memperdalam aspek tersebut dengan melihat bagaimana keberlanjutan diwujudkan melalui pembatasan akses ke ruang jeroan, pengaturan arus kunjungan, penggunaan pendapatan wisata untuk pemeliharaan ritual, dan mekanisme kontrol sosial berbasis adat. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan bukan hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai praktik konkret yang dijalankan komunitas melalui sistem adat, pengelola pura, dan kebijakan pemerintah.

Temuan Pradini dkk. (2023) tentang kontribusi ekonomi Tari Kecak terhadap pendanaan pemeliharaan pura menegaskan adanya hubungan timbal balik antara aktivitas ekonomi wisata dan keberlangsungan spiritual. Namun penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana keputusan terkait alokasi pendapatan dinegosiasikan oleh aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Studi ini melengkapi kekurangan itu dengan memetakan bagaimana desa



adat, pengempon pura, dan pemerintah daerah berinteraksi dalam menentukan prioritas ekonomi, pemeliharaan ruang suci, dan batas aktivitas komersial. Proses ini memperlihatkan bagaimana tata kelola pariwisata berpengaruh langsung terhadap stabilitas budaya dan spiritual masyarakat Pecatu.

Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan temuan-temuan di atas melalui kerangka komodifikasi budaya, cultural resilience, governance pariwisata, dan sustainable tourism development. Teori komodifikasi (Cohen; Greenwood) menjelaskan bagaimana elemen sakral direproduksi menjadi atraksi wisata. Cultural resilience (Adger) membantu membaca bagaimana masyarakat Pecatu mempertahankan nilai inti sambil menyesuaikan praktik adat agar tetap relevan dalam konteks pariwisata massal. Teori governance menjelaskan dinamika kekuasaan dan negosiasi antar lembaga dalam pengelolaan ruang suci, sedangkan sustainable tourism memberikan kerangka untuk menilai bagaimana keberlanjutan budaya, lingkungan, dan ekonomi dijaga melalui regulasi kunjungan, pembatasan ruang, dan penegakan etika wisatawan. Integrasi teori-teori ini memungkinkan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sakralitas Pura Luhur Uluwatu dipertahankan, direnegosiasi, atau ditantang di tengah tekanan industri wisata yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) sebagai pendekatan utama tanpa melibatkan wawancara ataupun observasi lapangan. Studi literatur dipahami sebagai proses sistematis untuk menelusuri, membaca, dan mengevaluasi karya ilmiah yang telah diterbitkan. Metode ini sesuai dengan panduan Snyder (2019) yang menjelaskan bahwa studi literatur dapat memberikan landasan teoritis yang kuat sekaligus memetakan perkembangan konsep dari suatu isu. Penggunaan metode ini memastikan bahwa analisis penelitian berangkat dari sumber-sumber akademik yang kredibel. Pendekatan ini juga dipilih karena fokus penelitian bertumpu pada pemahaman konseptual dan temuan ilmiah yang sudah tersedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data sekunder seperti artikel jurnal ataupun laporan penelitian serta buku akademik yang dapat diakses melalui platform terbuka seperti Google Scholar. Proses seleksi literatur dilakukan dengan penelusuran berdasarkan kata kunci yakni Pura Luhur Uluwatu, pariwisata budaya, sakralitas, komodifikasi budaya, *cultural resilience*, dan *governance* pariwisata. Teknik seleksi berbasis kata kunci ini mengikuti panduan dari praktik umum dalam studi literatur sebagaimana dijelaskan Zed (2014). Penggunaan kata kunci membantu peneliti memastikan bahwa sumber yang relevan, kredibel, dan tematik yang digunakan dalam analisis. Langkah ini dilakukan menjaga agar literatur yang dipilih tetap konsisten dengan fokus penelitian.

Sebagai tahap akhir, seluruh bahan literatur yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antar konsep dan poin penting yang berkaitan dengan pariwisata dan sakralitas di Pura Luhur Uluwatu. Proses ini membantu dalam memahami gambaran umum dari berbagai penelitian sebelumnya serta menyusun kesimpulan yang lebih menyeluruh. Dengan cara ini, studi literatur dapat memberikan dasar yang jelas bagi analisis pada bagian selanjutnya. Tahap ini dilakukan agar argumen yang dibangun dalam



penelitian tidak berdiri secara terpisah, tetapi tersusun berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap temuan-temuan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pariwisata di Pura Uluwatu

Pertumbuhan pariwisata di Pura Luhur Uluwatu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan bagian dari ekspansi industri pariwisata Bali yang semakin mengarah pada integrasi budaya dengan pasar global. Sejak awal 2000-an, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini meningkat secara signifikan seiring berkembangnya promosi destinasi wisata budaya Bali yang diposisikan sebagai “pulau spiritual” dalam imajinasi pariwisata internasional. Data menunjukkan bahwa Bali menerima 749.000 wisatawan internasional pada tahun 1985, kemudian meningkat drastis hingga mencapai 6.333.360 wisatawan mancanegara dan 10.120.786 wisatawan domestik pada tahun 2024, menunjukkan transformasi pariwisata dari skala regional menjadi industri global masif (Frame Bali, 2024; Bali Tourism Statistics, 2024). Tren ini memberikan konteks bahwa tekanan pariwisata pada situs-situs budaya termasuk Uluwatu merupakan konsekuensi dari perubahan struktural dalam industri wisata Bali, bukan fenomena terisolasi.

Peningkatan kunjungan turut tercermin pada skala lokal. Laporan Badung Tourism Office menyebutkan bahwa kawasan Pura Uluwatu menerima sekitar 15.000 pengunjung per hari, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling padat di Bali (Tempo, 2017). Meski angka tersebut bersifat estimatif dan belum tersedia data terpilah antara pengunjung wisata dan umat yang beribadah, intensitas kunjungan ini menunjukkan bahwa fungsi ruang mulai bergeser dari tempat ritual menjadi ruang publik wisata. Grafik kunjungan wisatawan asing ke Uluwatu pada periode 2003-2015 menunjukkan kenaikan berkelanjutan dan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan situs budaya lain seperti Pura Taman Ayun, menegaskan status Uluwatu sebagai salah satu ikon budaya yang telah terintegrasi dengan industri pariwisata internasional (Rengkung et al., 2018). Dengan demikian, dinamika jumlah wisatawan berkelindan dengan transformasi identitas tempat, dari ruang sakral menjadi komoditas budaya.

Transformasi ini tidak berhenti pada jumlah wisatawan, tetapi juga material dalam bentuk perubahan ruang dan aktivitas sosial. Munculnya pertunjukan Tari Kecak sebagai atraksi harian yang waktunya disesuaikan dengan pola kunjungan wisatawan memperlihatkan bagaimana budaya lokal di rekontekstualisasi menjadi produk wisata. Pertunjukan tersebut awalnya berbasis ritual dan ekspresi religius, namun kini beroperasi sebagai format pertunjukan terjadwal, dengan tata panggung, tiket masuk, dan kapasitas tempat duduk yang mengikuti logika pasar (Picard, 2011). Hal ini sejalan dengan konsep komodifikasi budaya sebagaimana dijelaskan Cohen (1988) dan Greenwood (1977), yaitu pergeseran nilai budaya dari makna sakral dan simbolik menjadi nilai tukar yang dapat dipasarkan. Di Uluwatu, batas antara sakral dan profan semakin kabur, karena elemen budaya tidak lagi sepenuhnya berada dalam ranah ritual, melainkan tampil sebagai hiburan visual yang dikurasi untuk memenuhi ekspektasi wisatawan.

Meskipun demikian, dinamika ini tidak semata-mata membawa implikasi negatif. Pengembangan pariwisata memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat Pecatu.



Pendapatan dari tiket masuk pura dan pertunjukan Tari Kecak, tumbuhnya usaha UMKM lokal seperti penjual souvenir, makanan, hingga penyedia jasa transportasi, menunjukkan adanya redistribusi manfaat ekonomi di tingkat masyarakat (Badung Tourism Revenue Report, 2022). Selain itu, pariwisata telah menciptakan lapangan kerja baru, mendorong alih profesi masyarakat dari sektor agraris atau perikanan menuju sektor jasa wisata, yang mencerminkan perubahan struktur ekonomi lokal. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya memodifikasi ruang, tetapi juga konfigurasi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, peningkatan intensitas pariwisata juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Kepadatan pengunjung menyebabkan tekanan pada infrastruktur, menciptakan masalah sampah, dan meningkatkan risiko degradasi lingkungan, terutama mengingat posisi Pura Uluwatu yang berada di tebing karst yang secara geologis rentan terhadap erosi. Laporan pemerintah Kabupaten Badung mencatat bahwa tumpukan sampah plastik di kawasan wisata meningkat signifikan sejak 2019, terutama akibat perilaku wisatawan yang tidak mengikuti aturan pelestarian lingkungan (DLHK Badung, 2023). Selain itu, tata kelola kawasan menghadapi tarik-menarik kepentingan antara desa adat, pengempon pura, pemerintah daerah, dan pelaku industri wisata situasi yang menunjukkan relevansi pendekatan governance dalam menganalisis distribusi kewenangan dan negosiasi otoritas budaya (Cole & Razak, 2015).

Dengan demikian, dinamika pariwisata di Pura Uluwatu memperlihatkan bahwa situs ini merupakan ruang negosiasi antara sakralitas, komodifikasi, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Transformasi yang berlangsung bukan hanya perubahan fisik atau aktivitas sosial, tetapi sebuah proses di mana nilai-nilai budaya dinegosiasikan ulang untuk mempertahankan relevansi dalam konteks ekonomi pariwisata global. Dinamika ini memperkuat tesis bahwa Uluwatu merupakan contoh konkrit bagaimana ruang sakral menjadi arena kontestasi antara nilai spiritual, komersialisasi, dan governance budaya yang semakin kompleks.

Ritual dan Praktik Keagamaan di Pura Uluwatu

Pura Luhur Uluwatu merupakan salah satu pura utama dalam Sad Kahyangan dan menjadi pusat pemujaan Dewa Rudra. Struktur ruang pura yang bertingkat menegaskan pemisahan yang jelas antara wilayah sakral dan profan. Uluwatu Temple (n.d) menjelaskan bahwa area jeroan pura dikhususkan bagi umat Hindu yang bersembahyang, sementara wisatawan diarahkan tetap berada di wilayah luar pura. Pengaturan ini menjadi strategi penting dalam mempertahankan kesucian ruang ibadah di tengah tingginya arus kunjungan wisata setiap harinya. Hal ini sejalan dengan temuan Hidajat et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pengaturan ruang di Uluwatu merupakan bagian dari strategi budaya masyarakat Pecatu dalam upaya menjaga sakralitas pura di tengah tekanan komodifikasi dan pariwisata masif.

Ritual keagamaan di Pura Uluwatu berjalan mengikuti siklus pakuwon dan sais, termasuk adanya pelaksanaan piodalan yang digelar setiap enam bulan sekali. Pada hari upacara tersebut, masyarakat Pecatu membawa sesajen, mengikuti prosesi penyucian, dan juga melakukan persembahyangan bersama. Dalam tulisan Firdaus, A (2024) ditekankan bahwa wisatawan diwajibkan memakai kain dan selendang serta mematuhi aturan pembatasan akses ke area suci selama prosesi ritual berlangsung. Penegakan aturan adat ini mencerminkan komitmen dari komunitas lokal untuk memastikan hubungan antara wisatawan dan ruang suci tetap harmonis. Temuan ini memperkuat argumen Hidajat et al. (2023) bahwa masyarakat



Pecatu menjadikan aturan ruang dan tata krama adat sebagai mekanisme dalam mempertahankan fondasi religius mereka dari dampak pariwisata.

Tari Kecak yang dipentaskan setiap sore menjadi ikon utama yang menjadi penghubung antara seni pertunjukan dengan spiritualitas lokal. Pertunjukan ini dilakukan pada saat matahari terbenam dengan memanfaatkan panorama tebing dan hamparan laut sebagai latar alami. Dalam artikel Indonesia Kaya (2025) digambarkan bahwa suasana Kecak Uluwatu sebagai pengalaman magis yang tercipta dari perpaduan cahaya senja, obor, dan lantunan ritmis suara “cak” yang dibawakan oleh puluhan penari. Kekuatan atmosfer tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kecak telah dikemas untuk wisata, unsur simbolik dan nilai spiritualnya tetap hadir.

Walau dipentaskan secara komersial, Kecak tetap mempertahankan akar ritualnya yang berasal dari tradisi Sanghyang. Dalam artikel Indonesia Kaya (2025) disebutkan bahwa Sanghyang merupakan tarian pemanggilan roh suci untuk perlindungan komunitas, sehingga unsur penyucian sebelum pertunjukan menjadi bagian penting yang masih dilakukan sampai sekarang. Penyucian penari menggunakan tirta oleh pemangku menunjukkan adanya kesinambungan antara seni pertunjukan dan praktik ritual. Kesinambungan ini diperkuat oleh temuan Hidajat et al. (2023) yang menjelaskan bahwa perubahan format pertunjukan tidak menghilangkan nilai spiritual, melainkan mengilustrasikan bagaimana masyarakat Pecatu menegosiasikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga integritas budaya. Dengan demikian, dinamika ritual dan pertunjukan di Pura Uluwatu menunjukkan adanya kemampuan masyarakat lokal mempertahankan makna sakral di tengah pertumbuhan pariwisata melalui regulasi adat, simbol-simbol budaya, serta pengelolaan ruang suci yang berkesinambungan.

Interaksi antara Pariwisata dan Ritual

Interaksi antara kegiatan pariwisata dan praktik ritual di Pura Luhur Uluwatu membentuk dinamika yang kompleks, karena dua fungsi yang berbeda ritual keagamaan dan aktivitas wisata massal berlangsung dalam ruang yang sama. Pura tetap berfungsi sebagai situs pemujaan aktif bagi masyarakat Pecatu, tetapi pada saat yang sama beroperasi sebagai destinasi budaya internasional dengan ritme kunjungan yang sangat tinggi. Situasi ini menjadikan Pura Uluwatu sebagai arena negosiasi antara kebutuhan ekonomi, pelestarian nilai sakral, dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan.

Dalam praktiknya, pariwisata tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti ritme kehidupan ritual masyarakat. Ketika upacara besar seperti piodalan atau prosesi penyucian berlangsung, desa adat dan pengempon pura menerapkan pembatasan akses wisatawan, menutup area jeroan, dan membatasi aktivitas fotografi guna menjaga suasana sakral. Wisatawan juga diwajibkan menggunakan kamen serta mengikuti jalur kunjungan yang telah diatur. Pengaturan ini merupakan manifestasi dari *cultural resilience*, yaitu upaya masyarakat mempertahankan nilai inti dengan mengatur batas-batas ruang agar sakralitas tidak larut dalam arus kunjungan yang masif (Adger, 2000). Dengan kata lain, ritus keagamaan tetap menjadi pusat orientasi ruang, dan kegiatan wisata harus menyesuaikan diri dengan kalender spiritual masyarakat.

Pertunjukan Tari Kecak menjadi titik interaksi paling eksplisit antara ritual dan pariwisata. Walaupun kini dipentaskan setiap hari dengan format terjadwal dan tiket berbayar, Kecak tetap memuat unsur-unsur spiritual yang berasal dari tradisi Sanghyang. Prosesi



penyucian penari sebelum tampil menunjukkan bahwa transformasi menjadi atraksi wisata tidak berarti hilangnya fungsi religius sepenuhnya. Di sinilah terlihat proses *komodifikasi budaya* yaitu elemen sakral diproduksi ulang untuk konsumsi wisatawan, namun tetap dipertahankan sebagian nilai spiritualnya. Proses ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Pecatu secara aktif melakukan negosiasi terhadap batas sakral profan, bukan sekadar mengikuti tekanan pasar wisata.

Interaksi tersebut juga berdampak pada pengaturan ruang. Arus kunjungan yang padat mendorong penguatan batas antara ruang sakral (jeroan) dan ruang profan (luar pura), yang diwujudkan melalui jalur khusus wisatawan, papan larangan, serta pengawasan ketat dari petugas adat. Penataan ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan spiritual, tetapi juga mencerminkan aspek *governance pariwisata* yaitu bagaimana otoritas adat, pengempon pura, Dinas Pariwisata, dan pelaku industri wisata berkoordinasi menentukan kebijakan ruang. Negosiasi lintas-aktor ini menjadi penting, mengingat kepentingan ekonomi dan kepentingan spiritual tidak selalu berjalan seiring. Misalnya, pengelola pertunjukan Kecak membutuhkan kapasitas penonton yang besar untuk meningkatkan pendapatan, tetapi pengempon pura menginginkan ketertiban dan keheningan pada waktu-waktu tertentu untuk menjaga suasana suci.

Interaksi antara wisata dan ritual tidak hanya menciptakan tantangan kultural, tetapi juga membawa persoalan keberlanjutan. Kepadatan pengunjung, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang tidak memahami aturan adat dapat mengganggu suasana spiritual dan mengubah pengalaman religius masyarakat. Dari perspektif *sustainable tourism development*, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan, pembatasan kunjungan, serta edukasi wisatawan mengenai etika kunjungan ke situs suci. Kebijakan seperti pembatasan akses area inti pura, pengelolaan sampah, serta penggunaan pendapatan wisata untuk pemeliharaan pura dan pembiayaan ritual merupakan upaya konkret menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan. Meskipun pariwisata membawa risiko profanisasi ruang sakral, masyarakat Pecatu menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat. Mereka memelihara ritual tradisional, menetapkan aturan tegas terkait ruang suci, dan mengintegrasikan pendapatan pariwisata untuk memperkuat kehidupan spiritual. Dengan demikian, interaksi antara pariwisata dan ritual di Pura Uluwatu bukan sekadar hubungan antara ekonomi dan agama, tetapi sebuah proses negosiasi kultural yang terus berlangsung. Ruang suci tidak hilang, melainkan berubah, dinegosiasikan, dan dikelola agar tetap memiliki makna spiritual meskipun berada dalam tekanan industri wisata global.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai dinamika pariwisata dan praktik ritual di Pura Luhur Uluwatu memperlihatkan bahwa kawasan ini merupakan contoh nyata bagaimana ruang sakral mengalami tekanan sekaligus adaptasi di tengah perkembangan industri wisata yang semakin masif. Pertumbuhan jumlah wisatawan yang terus meningkat membawa perubahan pada fungsi ruang pura, khususnya melalui komodifikasi elemen budaya seperti pertunjukan Tari Kecak yang kini dipentaskan secara terjadwal sebagai atraksi wisata. Meskipun perubahan ini berpotensi mengaburkan batas antara sakral dan profan, masyarakat Pecatu menunjukkan



kemampuan untuk menjaga nilai-nilai inti melalui pengaturan ruang, pembatasan akses, serta penerapan tata krama adat yang ketat pada saat prosesi ritual berlangsung. Interaksi antara pariwisata dan ritual tidak hanya melahirkan tantangan, tetapi juga menjadi ruang negosiasi bagi masyarakat lokal untuk menegosiasikan ulang makna-makna budaya yang mereka miliki. Cultural resilience tampak melalui upaya mempertahankan ritus keagamaan, menjaga struktur ruang suci, dan memelihara unsur spiritual dalam pertunjukan yang telah mengalami komodifikasi. Sementara itu, pendekatan governance pariwisata menjadi penting karena pengelolaan kawasan melibatkan banyak aktor, mulai dari desa adat, pengempon pura, pemerintah daerah, hingga pelaku industri wisata. Perbedaan kepentingan antar-aktor inilah yang memengaruhi bagaimana batas-batas sakral ditata, bagaimana alur wisatawan diarahkan, serta bagaimana pemanfaatan ekonomi dari kegiatan wisata dikelola.

Selain dimensi budaya dan tata kelola, keberlanjutan juga menjadi perhatian utama. Tekanan wisatawan yang besar menuntut strategi pengelolaan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kebersihan kawasan, serta perlindungan ekologi tebing. Upaya seperti pengaturan jumlah pengunjung, jalur wisata, edukasi etika berkunjung, hingga pemanfaatan pendapatan wisata untuk pemeliharaan ritual menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Pura Uluwatu dapat terus menjalankan fungsi spiritualnya tanpa kehilangan esensinya di tengah pariwisata massal. Dengan demikian, Pura Luhur Uluwatu bukan hanya ruang yang mengalami komersialisasi, tetapi juga ruang yang menunjukkan bagaimana nilai spiritual, kepentingan ekonomi, dan tata kelola budaya dapat saling bernegosiasi. Kawasan suci ini tetap bertahan sebagai tempat ibadah sekaligus destinasi wisata global karena adanya keseimbangan yang terus dikelola oleh masyarakat Pecatu dan para pemangku kepentingan. Studi ini menegaskan bahwa pelestarian budaya di tengah arus pariwisata tidak bergantung pada penolakan modernitas, melainkan pada kemampuan komunitas lokal untuk mengatur ulang ruang, praktik, dan otoritas agar tetap selaras dengan nilai-nilai yang mereka anggap sakral.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). *Social and ecological resilience: Are they related?* Progress in Human Geography, 24(3), 347–364.
- Apsari, N. M. (2023). “Negosiasi Sosial dalam Komodifikasi Budaya di Bali.” *Jurnal Pariwisata Budaya* 5, no. 2 (2023): 112–130.
- Ardika, I. W. (2017). *Warisan budaya dan pariwisata di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Bali Tourism Statistics. (2024). *Annual tourism report 2024*. Bali Provincial Tourism Office. [Bali Government Tourism Office](#)
- Badung Tourism Office. (2017). *Pura Uluwatu visitor report*. Pemerintah Kabupaten Badung. [Ketahui Lebih Banyak Destinasi dan Pariwisata Badung](#)
- Badung Tourism Revenue Report. (2022). *Pendapatan pariwisata Kabupaten Badung tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Badung.



- Brata, I. P. (2020). Pelestarian warisan budaya dalam pengembangan pariwisata Bali. *Jurnal Kajian Budaya Nusantara*.
- Butler, Richard W. "Sustainable Tourism: A State-of-the-Art Review." *Tourism Geographies* 1, no. 1 (1999): 7–25.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386
- Cole, S., & Razak, R. A. (2015). Tourism governance and local power relations. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(2), 1–18.
- Dewi, N. L. (2020). *Cultural tourism and sustainable development in Bali*. Jakarta: Gramedia.
- DLHK Badung. (2023). *Laporan pengelolaan sampah kawasan wisata Kabupaten Badung 2019–2023*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. (2021). *Statistik pariwisata Bali 2021*. Denpasar.
- Firdaus, A. (2024, April 22). Pura Uluwatu tempat suci di tepi tebing Yang Megah di Bali. kumparan. <https://kumparan.com/m-azka/pura-uluwatu-tempat-suci-di-tepi-tebing-yang-megah-di-bali-22amuZx8UQc>
- Greenwood, D. J. (1977). Culture by the pound: An anthropological perspective on tourism as cultural commodification. In V. Smith (Ed.), *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism* (pp. 129–138). University of Pennsylvania Press, 1989.
- Hall, C. Michael (2011). *Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships*. 2nd ed. Harlow: Pearson Education, 2011.
- Hidajat, R., Hasyimi, M. 'Afaf, Yanuartuti, S., & Jamnongsarn, S. (2023). Dari ritual ke seni pertunjukan pada kecak Ramayana di Uluwatu Bali. *JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Cultural Studies)*, 8(1), 68. <https://doi.org/10.17977/um037v8i12023p68-77>
- Ni Luh Dewi. (2020). Cultural tourism and sustainable development in Bali. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*
- Permana, I. W., & Dewi, N. L. (2024). Peranan masyarakat dalam pelestarian budaya Bali. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*.
- Picard, M. (2011). *Bali: Pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pitana, I. G. (2019). Pariwisata budaya Bali di tengah tantangan globalisasi. *Jurnal Kajian Bali*, 9(1), 1–16.
- Pradini, G., et al. (2023). Perkembangan objek wisata Pura Uluwatu Bali. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 885–889.
- Pradini, N. L. P., Sudiana, I. K., & Wiguna, K. A. (2023). Kontribusi ekonomi pertunjukan tari



- Kecak terhadap pemeliharaan pura di Bali. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45–59.
- Pujaastawa, I. G. M., & Sudana, I. M. (2022). Implementasi Tri Hita Karana dalam pengelolaan destinasi wisata Bali. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 10(1), 33–50.
- Pura Uluwatu: Senja, Kecak, Dan Keagungan di selatan Bali. Indonesia Kaya. (2025, May 10). <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/pura-uluwatu-senja-kecak-dan-keagungan-di-selatan-bali/>
- Rengkung, R., et al. (2018). Analisis perkembangan kunjungan wisatawan ke destinasi budaya di Bali periode 2003–2015. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 12(1), 45–60
- Sudiarta, I. N. (2020). Sakralitas dan komersialisasi dalam pariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Budaya*, 5(2), 45–58.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Uluwatu Temple. (n.d.). Uluwatu Temple. <https://uluwatutemple.id/uluwatu-temple>
- Wirawan, I. M. (2018). Keseimbangan ekonomi dan budaya dalam pengembangan pariwisata Bali. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(3), 205–219.
- Yastari, I. G. (2024). Kajian sosial budaya di kawasan Pura Uluwatu. *Prosiding Seminar Kebudayaan Bali*.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia